

**STRATEGI MITIGASI TERHADAP RISIKO PETANI
MENGHADAPI ALIH FUNGSI LAHAN
(Kelurahan Setianagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat)**

***MITIGATION STRATEGY IN DEALING WITH THE FARMERS' RISK OVER
LAND CONVERSION IN SETIANAGARA, CIBEUREUM DISTRICT,
TASIKMALAYA CITY, WEST JAVA***

Nita Agresia Sijabat^{*}, Trisna Insan Noor

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

*Email: nita16001@mail.unpad.ac.id

(Diterima 24-02-2020; Disetujui 04-05-2020)

ABSTRAK

Strategi mitigasi merupakan suatu cara, teknik, taktik, atau siasat yang dilakukan sebagai tindakan preventif dalam pengurangan dan pencegahan dampak negatif akan suatu hal yang terjadi. Ketersediaan lahan sawah di Kelurahan Setianagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat yang kini semakin langka akibat terjadinya alih fungsi lahan dan membuat petani kehilangan mata pencahariannya. Alih fungsi lahan menyebabkan berbagai risiko yang variatif yang menimbulkan kerugian bagi petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi risiko petani terancam mengalihfungsikan lahannya dan menganalisis strategi mitigasi terhadap risiko petani sawah yang tepat untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Desain penelitian ialah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Alat analisis menggunakan alat analisis deskriptif dan HOR (*House of Risk*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi petani sehingga terancam mengalihfungsikan lahannya adalah adanya proyek pembangunan, belum legalnya perundang-undangan, sistem waris, dan sulitnya pasokan air. Adapun strategi mitigasi petani sawah yang tepat untuk mengendalikan alihfungsi lahan di Kelurahan Setianagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat yaitu (1) implementasi rencana detail tata ruang; (2) penetapan LP2B; (3) pendampingan dan penyuluhan; dan (4) perbaikan irigasi.

Kata kunci: Strategi Mitigasi, Risiko, *House of Risk* (HOR), Alih Fungsi Lahan

ABSTRAC

The mitigation strategy defined as a method, a technique, or a tactic to reduce and or to prevent the negative impact of the things that could happen. The availability of the rice field in Setianegara, in the district of Cibeureum, Tasikmalaya City, the Province of West Java is increasingly scarce due to the land conversion and make the farmers lose their job. This land conversion creates a lot of variety of risks and brings loss to the farmers. This research objective was to identify the priority factors that affect the risk of the farmers converse the land and to analyze the mitigation strategy over the rice field farmers to restrain the land conversion. The research design was quantitative research with survey methods. The analytical tools used in this research were the descriptive and House of Risk (HOR) analysis. The result of this research indicated that the priority factors that affected the farmers to converse the land were the building projects, unlegalized laws, the inheritance problem, and lacks of water resources. The mitigation strategy of the farmers that should be used to restrain the land conversion in Setianegara, Cibeureum District, Tasikmalaya City, the Province of West Java should be : (1) planning implementation of the spatial detail, (2) establishing The LP2B: (3) assisting and counselling; and (4) improving the irrigation.

Keywords: Mitigation Strategy, Risk, House of Risk (HOR), Land Conversion

PENDAHULUAN

Indonesia mengharapkan sektor pertanian menjadi penyokong perekonomian, tercemin dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian yang tumbuh 3,7% dari tahun 2017¹. Namun, kinerja sektor pertanian masih dihadapkan pada berbagai masalah diantaranya sumberdaya yang langka (*lack of resources*). Salah satu yang utama adalah semakin langkanya sumberdaya lahan pertanian (Isa, 2015). Petani Indonesia hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 ha/keluarga (Isa, 2015).

Petani mengharapkan keuntungan yang besar agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit petani mengalami kerugian karena risiko dan ketidakpastian yang dihadapinya. Petani dikatakan menghadapi risiko manakala mengetahui kemungkinan output yang akan diperoleh yang merupakan suatu ketidakpastian. Ketidakpastian yang direspon oleh petani hanya berdasarkan asumsi saja, dapat membuat respon tersebut tidak tepat sasaran. Respon petani yang tidak tepat sasaran membuat

pertanian menjadi salah satu sektor dengan risiko yang tinggi (Rasmikayati, dkk, 2017).

Tingginya risiko pertanian memotivasi petani untuk beralih ke sektor lain agar memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dengan profit yang lebih tinggi (Dadzie *et al*, 2012). Motivasi petani untuk beralih ke sektor lain juga akan menimbulkan kecenderungan petani dalam menjual dan mengalihfungsikan lahannya (Prayuda, dkk, 2013). Sejalan dengan hal tersebut, Kota Tasikmalaya sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas lahan pertanian yang cukup luas seperti pada Tabel 1. Lahan tersebut mengalami tingkat konversi lahan yang cukup tinggi yang dapat mengancam ketahanan pangan Kota Tasikmalaya.

Pemerintah telah menetapkan UU No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya menjaga ketersediaan lahan. Namun, data membuktikan bahwa masih terjadi konversi lahan dan konversi terbesar terjadi di Kecamatan Cibeureum (Tabel 2). Menurut penelitian Martunisa (2018), hal ini terjadi karena keterdekatan kecamatan tersebut dengan pusat kota serta adanya rencana pembangunan

¹ Detik.com. 2018. PDB Pertanian 2018 tumbuh 3,7%, Kementan: Melebihi Target. www.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4545360/pdbpertanian-tumbuh37kementanmelebihitarget

kecamatan tersebut menjadi pusat pendidikan Kota Tasikmalaya. Berbagai faktor tersebut menjadi sumber timbulnya

resiko bagi petani yang kemudian akan semakin mendesak petani untuk menjual lahan pertaniannya.

Tabel 1. Luas Lahan Baku Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014-2016 (ha)

No.	Kota/Kabupaten	2014	2015	2016
1.	Kabupaten Indramayu	115.913	115.555	115.833
2.	Kabupaten Karawang	97.529	96.428	95.876
3.	Kabupaten Sukabumi	63.986	66.692	66.579
4.	Kota Tasikmalaya	5.986	5.947	5.904
5.	Kota Banjar	3.318	3.318	3.313
6.	Kota Sukabumi	1.532	1.486	1.464

Sumber: BPS, 2017

Tabel 2. Perkembangan Luas Lahan Baku Sawah di 4 Kecamatan Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2016 (ha)

No	Kecamatan	2014	2015	2016	Luas Konversi
1.	Kawalu	1.244	1.244	1.244	-
2.	Cibeureum	763,5	763,5	758,5	5
3.	Mangkubumi	1.134	1.134	1.132	2
4.	Purbaratu	499	499	494	5
Jumlah		3640,5	3640,5	3628,5	12

Sumber : Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya, 2017

Setianagara yang merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, juga ikut merasakan dampak alih fungsi lahan. Petani di Kelurahan Setianagara mengetahui risiko yang diakibatkan pembangunan yang mulai berjalan di areal lahan yang digarap. Berbagai risiko akan dihadapi oleh petani, baik petani yang merupakan petani pemilik penggarap dan juga petani penggarap. Setiap risiko yang dihadapi sebaiknya diberikan tindakan antisipasi terhadap kerugian yang lebih besar yang akan dihadapi oleh petani.

Tindakan antisipatif atau preventif tersebut disebut juga dengan mitigasi. Secara umum, mitigasi adalah pengurang-an, pencegahan atau dapat juga dikatakan sebagai proses mengupayakan berbagai tindakan preventif untuk meminimalisasikan dampak negatif bencana yang akan terjadi (Noor, 2012). Harapannya selain menekan laju konversi lahan yang terjadi, perlu adanya upaya preventif atau antisipasi guna meminimalisir risiko yang timbul akibat faktor-faktor yang mempengaruhi risiko tersebut. Namun, pada kenyataan di lapangan, petani belum

mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan ketika terjadi alih fungsi lahan. Sehingga penelitian mengenai strategi mitigasi terhadap risiko petani menghadapi alih fungsi lahan dirasa tepat dilakukan di Kelurahan Setianagara yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah strategi mitigasi terhadap petani sawah. Tempat penelitian berada di Kelurahan Setianagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Tempat penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah petani pemilik penggarap dan petani penggarap lahan sawah di Kelurahan Setianagara, dimana lahan tersebut masuk ke dalam kawasan LP2B. Populasi yang didapatkan yaitu sebanyak 104 petani pemilik penggarap dan petani penggarap, sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 51 orang. Teknik pengambilan sampel

dengan menggunakan teknik *probability sampling* yaitu *simple random sampling*.

Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Alat analisis dalam penelitian ini adalah analisi *House of Risk* (HOR) yang merupakan modifikasi dari *Failure Modes and Effect of Analysis* (FMEA), untuk memprioritaskan sumber risiko mana yang pertama dipilih untuk diambil tindakan yang paling efektif dalam rangka mengurangi potensi risiko dari sumber risiko (Ulfah, dkk, 2016). Terdapat 2 fase yang digunakan dalam melakukan pendekatan HOR (Pertiwi & Susanty, 2017), yaitu:

- (1) HOR 1 digunakan untuk menentukan tingkat prioritas agen risiko yang harus diberikan sebagai tindakan pencegahan.
- (2) HOR 2 adalah prioritas dalam pengambilan tindakan yang dianggap efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis HOR 1

HOR (*House of Risk*) Tahap 1 merupakan tahap awal mengidentifikasi kejadian risiko dan sumber risiko yang terdapat dalam faktor pendorong dan faktor penarik petani alih fungsi lahan. Proses identifikasi dilakukan dengan

wawancara terhadap petani yang sudah dan akan alih fungsi lahan.

1. Faktor Pendorong

- a. Sistem waris
- b. Kurangnya pengetahuan untuk usaha

2. Faktor Penarik

- a. Sulitnya pasokan air
- b. Belum legalnya perundang-undangan
- c. Adanya proyek pembangunan
- d. Pengembang

e. Provokasi dari petani lain

f. Sektor lain yang lebih menjanjikan

Berdasarkan identifikasi risiko yang dilakukan terhadap setiap faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian, maka dapat dikatakan bahwa risiko-risiko dapat menimbulkan. Berbagai kejadian risiko yang disebabkan oleh alih fungsi lahan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Daftar Kejadian Risiko Alih Fungsi Lahan

Kejadian Risiko	Kode	Skala Dampak (1-10)
Menurunnya produksi pangan keluarga	E1	4,2
Lahan terpecah-pecah	E2	2,5
Lahan di bagi-bagi lalu di jual	E3	1,8
kehilangan semangat (<i>discourage</i>) untuk berusaha	E4	2,7
Tidak ada upaya mempertahankan lahan	E5	2,3
Petani kehilangan pekerjaan (pengangguran)	E6	2
Petani alih profesi	E7	2,5
Produksi menurun	E8	2,4
Alih Komoditas	E9	2,2
Petani menjual lahan	E10	2
Pembangunan kawasan non pertanian semakin meningkat	E11	6,7
Petani menghabiskan modal usaha yang sudah dimiliki	E12	2,6
Petani tidak mengetahui menjalankan usaha	E13	2,9
Menurunkan nilai sosial lahan	E14	2,9
Petani menjual lahan	E15	2
Petani beralih profesi	E16	2,5
lahan beralihfungsi dari pertanian ke non pertanian	E17	1,8

Sumber: Analisis data primer, 2019

Kejadian risiko yang memberikan dampak yang paling besar yang dirasakan oleh petani dalam menghadapi alih fungsi lahan, seperti yang dijelaskan pada Tabel 3. “Pembangunan kawasan non pertanian semakin meningkat” (E11) di Kelurahan Setianagara sehingga menyebabkan lahan pertanian semakin

sempit. Pembangunan yang terdapat di Kelurahan Setianagara adalah pembangunan dan ekstensifikasi atau perluasan Sekolah Terpadu yaitu Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Wadda'wah dan adanya pembangunan Landasan Udara Wiriadinata.

Kejadian-kejadian risiko (Tabel 3), muncul berdasarkan penyebab yang menjadi agen risiko. Agen-agen risiko

penyebab dampak dalam menghadapi alih fungsi lahan. Adapun agen-agen risiko disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Daftar Agen Risiko Alih Fungsi Lahan

Faktor Penyebab	Risk Agent (Sumber Risiko)	Kode	Kemungkinan Kejadian (O)
Faktor Pendorong	Sistem waris	A1	4,5
	Kurang pengetahuan untuk usaha	A2	2,1
Faktor Penarik	Sulitnya pasokan air	A3	2,9
	Belum legalnya Per-UU Kota	A4	5
	Adanya proyek pembangunan	A5	5,4
	Pengembang	A6	2
	Provokasi dari petani lain	A7	1,4
	Sektor lain yang lebih menjanjikan	A8	1,8

Sumber: Analisis data primer, 2019

Setiap pembobotan nilai yang muncul pada Tabel 4 berasal dari hasil wawancara dengan petani. Hasil identifikasi agen risiko menunjukkan terdapat 8 agen risiko yang teridentifikasi. Tingkat kemunculan (*occurence*) pada agen risiko yang tertinggi adalah adanya proyek pembangunan (A5).

Setelah mengetahui bobot nilai pada setiap agen risiko, data yang telah

didapat selanjutnya dimasukkan ke dalam Tabel Pareto, yaitu pada Tabel 4 untuk mendapatkan nilai *Aggregate Risk Potential* (ARP) pada setiap agen risiko. Setiap nilai ARP yang didapat dilakukan perankingan dari yang tertinggi sampai terendah, nilai ARP tertinggi menunjukkan agen risiko yang memiliki pengaruh pada petani dalam menghadapi alih fungsi lahan seperti yang terdapat dalam Tabel 5.

Tabel 5. Tabel Pareto

Risk Agent	ARP	Peringkat	%ARP	% Total Cum ARP
A5	1408,86	1	36,57	38,57
A4	710,5	2	18,44	55,01
A1	474,75	3	12,32	67,34
A3	416,73	4	10,83	78,15
A6	375,52	5	11,02	87,90
A8	322,56	6	8,37	96,27
A7	76,16	7	1,98	98,25
A2	67,41	8	1,75	100,00
Total	3852,49		100%	

Sumber: Analisis data primer, 2019

Hasil perhitungan nilai ARP menunjukkan bahwa “adanya proyek pembangunan” (A5) dan “belum legalnya per-UU” (A4) merupakan agen risiko dengan nilai ARP tertinggi. Agen risiko yang sudah teridentifikasi dilakukan klasifikasi dengan menggunakan aturan pareto. Klasifikasi agen risiko bertujuan untuk memudahkan penentuan sumber risiko yang paling memiliki pengaruh sehingga penting untuk diberikan aksi mitigasi sebagai alternatif upaya dalam meminimalisir risiko dan kerugian yang timbul (Setyabudi, 2018). Menurut Ulfah (2016), pengklasifikasian agen risiko dilakukan berdasarkan aturan 80:20, sehingga agen risiko di klasifikasi menjadi 3 bagian, yaitu:

- Klasifikasi A: Agen risiko tingkat tinggi dengan jumlah 50% dari bagian agen risiko secara keseluruhan.
- Klasifikasi B: Agen risiko tingkat sedang dengan jumlah 30% dari

bagian agen risiko secara keseluruhan.

- Klasifikasi C: Agen risiko tingkat rendah dengan jumlah 20% dari bagian agen risiko secara keseluruhan.

Hasil klasifikasi risiko menunjukkan bahwa 55,01% agen risiko yang termasuk dalam klasifikasi A, 23,15% agen risiko termasuk dalam klasifikasi B, dan 23,12 % agen risiko masuk ke dalam klasifikasi C. Setiap agen risiko tidak semua agen yang akan mendapatkan penanganan. Berdasarkan pengklasifikasian agen risiko dengan klasifikasi A dan B yaitu agen risiko dengan risiko tinggi dan risiko sedang menjadi risiko prioritas yang penting untuk diberikan tindakan mitigasi. Klasifikasi agen risiko disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Klasifikasi Agen Risiko

Risk Agent	ARP	Peringkat	%ARP	% Total Cum ARP	klasifikasi ABC
A5	1408,86	1	36,57	36,57	A (Risiko Tinggi)
A4	710,5	2	18,44	55,01	
A1	474,75	3	12,32	67,34	B (Risiko Sedang)
A3	416,73	4	10,83	78,15	
A6	375,52	5	11,02	87,90	C (Risiko Rendah)
A8	322,56	6	8,37	96,27	
A7	76,16	7	1,98	98,25	
A2	67,41	8	1,75	100,00	
Total	3852,49		100%		

Sumber : Analisis data primer, 2020

Analisis HOR II

Agen risiko tinggi menjadi risiko prioritas yang diperoleh dari tahap sebelumnya. Agen risiko prioritas akan mendapatkan fokus penanganan dalam HOR 2. Dalam HOR 2 merumuskan tindak mitigasi yang tepat dalam penanganan agen risiko untuk meminimalisir dampak yang terjadi.

Berdasarkan strategi mitigasi yang merupakan hasil diskusi dengan petani, hasil observasi di lapangan, dan studi literatur yang efektif dalam menangani agen risiko prioritas, terdapat 9 usulan strategi mitigasi. Analisis hubungan antara agen risiko dan tindakan mitigasi dilakukan dengan memberikan nilai korelasi yaitu dimana 0 menunjukkan

tidak ada korelasi sedangkan 1, 3, 9 masing-masing menunjukkan korelasi rendah, sedang dan tinggi.

Dalam mengetahui strategi aksi atau tindakan terhadap agen-agen risiko prioritas, penting untuk dilakukan penilaian strategi mitigasi dengan mempertimbangkan keefektifan dalam penerapan strategi. Keefektifan penerapan strategi mitigasi diperoleh dari persepsi petani dalam menerima setiap aksi yang ditawarkan dalam proses wawancara. Setelah dilakukan penilaian, maka dilakukan perangkingan terhadap dengan melihat hasil *Effectiveness to Difficulty* (ETD) untuk setiap *preventive Action* (PA) dalam Model HOR 2.

Tabel 7. Model HOR 2

Risk Agent (Aj)	Preventive Action (PAk)									ARPj
	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8	PA9	
A5				9		1	3		1	1408,9
A4		3	1		3		9			710,5
A1	9									474,75
A3								9		416,73
Tek	4227,8	2131,5	710,5	12679,7	2132,5	1408,8	10621,08	4226,6	1408,9	
Dk	3	4	4	4	4	4	3	3	4	
ETDk	1409,3	1532,9	177,6	3169,9	532,9	532,2	2655,3	1408,9	352,2	
Rk	3	5	9	1	6	7	2	4	8	

Sumber: Analisis data primer, 2019

Penilaian tindakan mitigasi kemudian diklasifikasikan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu:

- Klasifikasi A: Strategi mitigasi dengan keefektifan tingkat tinggi

dengan jumlah 50% dari bagian strategi mitigasi secara keseluruhan

- Klasifikasi B: Strategi mitigasi dengan keefektifan tingkat sedang dengan jumlah 30% dari bagian strategi mitigasi secara keseluruhan
- Klasifikasi C: Strategi mitigasi dengan keefektifan tingkat rendah

dengan jumlah 20% dari bagian strategi mitigasi secara keseluruhan

Hasil penilaian tindakan mitigasi menghasilkan lima prioritas strategi mitigasi risiko yang di peroleh dari klasifikasi strategi mitigasi yang secara rinci yang disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Klasifikasi Strategi Mitigasi

Rank	Kode	Strategi Mitigasi	ETD	%ARP	% Total Cum ETD	Klasifikasi ABC
1	PA4	Implementasi rencana detail tata ruang	3169,94	29,93	29,93	A (tingkat keefektifan tinggi)
2	PA7	Penetapan LP2B	2655,27	25,07	55	
3	PA1	Pendampingan dan penyuluhan	1409,3	13,31	68,31	B (tingkat keefektifan sedang)
4	PA8	Perbaikan irigasi	1408,9	13,30	81,61	
5	PA2	Pelatihan kerja	532,88	5,03	86,64	C (tingkat keefektifan rendah)
6	PA5	Pembelajaran sosial	532,88	5,03	91,67	
7	PA6	Advokasi	352,22	3,33	95	
8	PA9	Bangun komunitas	352,22	3,33	98,32	
9	PA3	Penerangan (media)	177,63	1,68	100	

Sumber: Analisis data primer, 2019

Tabel 8 menunjukkan hasil perhitungan dari HOR 2. Terdapat 55 % strategi mitigasi yang termasuk ke dalam klasifikasi A, 26,61% strategi mitigasi yang masuk ke dalam klasifikasi B, dan

18,39% masuk ke dalam klasifikasi C. Setiap agen risiko prioritas dengan tindakan penanganannya dirangkum dalam Tabel 9.

Tabel 9. Daftar Strategi Mitigasi Risiko

Kode	Deskripsi Risk Agent	Kode	Deskripsi PA
A5	Adanya proyek pembangunan	PA4	Implementasi Rencana detail tata ruang
A4	Belum legalnya per-UU kota	PA7	Penetapan LP2B
A1	Sistem Waris	PA1	Pendampingan dan Penyuluhan
A3	Sulitnya pasokan air	PA8	Perbaikan irigasi

Sumber: Analisis data primer, 2019

Strategi mitigasi yang tepat sebagai tindakan penanganan prioritas yaitu “Implementasi rencana detail tata ruang (PA4)”. Tindakan mitigasi kedua adalah “penetapan LP2B (PA7)”. Selanjutnya adalah adanya tindakan “pendampingan dan penyuluhan (PA1)” serta “Perbaikan irigasi (PA8)”.

STRATEGI MITIGASI

Strategi mitigasi penting untuk dilakukan terhadap risiko petani dalam menghadapi terjadinya alih fungsi lahan. Strategi mitigasi terhadap petani bertujuan untuk pengurangan serta pencegahan dampak negatif yang akan mengurangi kesejahteraan petani. Strategi mitigasi yang telah dirumuskan dan dianalisis berdasarkan identifikasi keefektifan penerapan setiap strategi diperoleh strategi mitigasi yang paling efektif untuk diterapkan di Kelurahan Setianagara. Strategi mitigasi yang tepat untuk dilakukan terhadap petani di Kelurahan Setianagara yaitu Implementasi Rencana Detail Tata Ruang, Penetapan LP2B, Pendampingan dan penyuluhan, dan perbaikan irigasi.

Menurut PerDa Tasikmalaya No.10 pasal 1 Tahun 2016 bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tasikmalaya adalah penjabaran dan

pendetailan RTRW yang bersifat operasional sebagai landasan di dalam mengeluarkan izin pembangunan². Landasan hukum tentang rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan dijadikan acuan dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang terjadi pada areal yang tidak sesuai dengan RDTR. Implementasi RDTR ditetapkan dengan perencanaan yang matang dalam membagi setiap ruang wilayah menjadi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau yang proporsional.

Rencana detail tata ruang yang telah membagi ruang wilayah menjadi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Ruang terbuka hijau yang termasuk didalamnya LP2B yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. LP2B di Kelurahan Setianagara saat ini masih dalam tahap pengkajian. LP2B ditetapkan berdasarkan UU No.41 Tahun 2009 menjadi salah satu strategi mitigasi yang tepat diterapkan di Kelurahan Setianagara. Penetapan LP2B ini bertujuan agar petani dapat mempertahankan lahan yang dimiliki dan digarap. Penetapan LP2B yang akan menolong petani yang menjadi

² Wali Kota Tasikmalaya, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/kota_tasikmalaya_10_2016.pdf

korban alih fungsi lahan. Penerapan LP2B ketika terjadi alih fungsi lahan di suatu areal sawah, maka areal tersebut harus diganti seluas lahan yang beralih fungsi.

Penerapan LP2B dapat diikuti dengan adanya pendampingan dan penyuluhan dari pihak terkait seperti BPP yang tersedia di Kelurahan Setianagara, Kabupaten Cibereum. Pendampingan dan penyuluhan dapat bertujuan dalam mendorong semangat petani dalam berusahatani. Pendampingan dan penyuluhan juga dapat menjadi sumber informasi yang tepat bagi petani khususnya petani yang tidak dapat mengadopsi teknologi. Pendampingan dan penyuluhan menjadi sumber dalam penyampaian informasi mengenai bagaimana petani dapat mempertahankan lahannya sehingga petani tidak mudah melepaskan lahannya.

Lahan sawah di Kelurahan Setianagara masih terdapat areal yang belum menggunakan irigasi teknis perlu untuk diperhatikan. Irigasi yang lancar mendorong petani untuk dalam bertahan dalam kondisi cuaca yang tidak menentu. Perbaikan irigasi menjadi salah satu strategi mitigasi yang tepat bagi petani, terutama saat musim kemarau panjang. Irigasi yang baik membantu

mensejahterahkan kehidupan petani karena lahan dapat diusahakan sepanjang tahunnya.

Penerapan strategi mitigasi yang tepat akan meminimalisir atau mencegah dampak negatif terhadap petani di Kelurahan Setianagara. Petani tidak akan kehilangan lahan dan semangat dalam berusahatani, sementara lahan sawah akan terjaga ketersediaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi petani sehingga terancam mengalihfungsikan lahannya adalah adanya proyek pembangunan, belum legalnya per-UU, sistem waris, dan sulitnya pasokan air.
2. Strategi mitigasi petani sawah yang tepat untuk mengendalikan alihfungsi lahan di Kelurahan Setianagara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat yaitu (1) implementasi rencana detail tata ruang; (2) penetapan LP2B; (3) pendampingan dan penyuluhan; dan (4) perbaikan irigasi.

SARAN

1. Pemerintah Kota Tasikmalaya sebaiknya merealisasikan Rencana

Detail Tata Ruang yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga pembangunan di areal sawah yang tidak sesuai dengan implementasi RDTR dapat dikendalikan serta ruang terbuka hijau masih terjaga ketersediaannya.

2. Sebaiknya Pemerintah Kota Tasikmalaya segera menetapkan LP2B sehingga dapat direalisasikan dan disosialisasikan kepada seluruh pihak yang bersangkutan, salah satunya adalah pemilik lahan di Kelurahan Setianagara.
3. Penetapan LP2B kepada petani harus diberikan perhatian oleh pihak *stakeholder* dengan pemberian insentif dan disinsentif kepada petani yang menggarap lahan, baik petani pemilik penggarap maupun petani penggarap saja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, juga kepada Ir. H. Dede Sudrajat, M.P. dan seluruh pihak yang terlibat yang turut memberikan kontribusi pada saat penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadzie, S.K.N, Acquah, H. de-Graft. (2012). Attitudes Toward Risk and Coping Responses: The Case of Food Crop Farmers at Agona Duakwa in Agona East District of Ghana. *International Journal of Agriculture and Forestry*, 2(2): 29-37. doi: 10.5923/j.ijaf.20120202.06.
- Isa, I. (2015). *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Jakarta: Badan Pertahanan Nasional.
- Noor, D. (2012). *Pengantar Mitigasi Bencana Geologi*. Bogor: Pakuan University Press. Palar
- Pertiwi, Y. E., & Susanty, A. (2017). *Analisis Strategi Mitigasi Resiko Pada Supply Chain Cv Surya Cip Dengan House Of Risk Model*.
- Prayuda, E. S., Sihombing, L., & Kesuma, S. I. (2013). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah dan Strategi Mitigasinya Terhadap Program Swasembada Beras Di Kabupaten Asahan (Studi Kasus: Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan). *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, 2(12): 1-15.
- Rasmikayati, E., Sulistiyowati, L., & Saefudin, B. . (2017). Risiko Produksi dan Pemasaran Terhadap Pendapatan Petani Mangga: Kelompok Mana yang Paling Berisiko, *Mimbar Agribisnis* 3(2): 105-116.
- Setyabudi, A. G., (2018). Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Cerdas Manajemen Risiko Rantai Pasok Komoditas Belimbing. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Ulfah M. (2016). Rancang bangun model manajemen risiko rantai pasok gula rafinasi. *Disertasi*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.